

## Studi Keragaan Kebun Kelapa Sawit Swadaya di Kabutapen Kubu Raya

Henny Sulistyowati<sup>1,\*</sup>, Sarbino<sup>1</sup>, Nur Arifin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura  
Jalan Prof DR. Hadari Nawawi, Kode Pos 1049, Indonesia

\*Korespondensi: henny.sulistyowati@faperta.untan.ac.id

### Abstract

**Performance Study of Independent Small Holder Oil Palm Plantation at Kubu Raya Regency.** *Independent small holder oil palm plantations are small holder oil palm plantations that are not affiliated with any institution. Farmers sell their own produce to local mills directly or through traders. Independent oil palm smallholders are faced with various problems, including limited access to information technology sources, financing, and markets. Independent small holder oil palm plantations in Kubu Raya Regency are facing a bigger problem because most of the plantations are on peatlands, therefore efforts are needed to help these farmers. Efforts that need to be made at this time are the provision of a database of independent small holder oil palm plantations, which so far do not exist. This study aims to obtain data on the performance of independent small holder oil palm plantations in Kubu Raya Regency. Collecting data using the interview method with a questionnaire. The results showed that most of the independent small holder oil palm farmers in Kubu Raya Regency running their business only as a side job so that the management is not optimal. Another obstacle is the difficulty in accessing the market so they are forced to sell their fruit through middlemen. The problem of transportation, namely transportation and inadequate roads, is also one of the causes of the difficulty in marketing the fresh fruit bunch.*

**Keywords:** *Small holder oil palm, Kubu Raya*

### 1. Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, selain sebagai penggerak perekonomian di wilayah pedesaan, meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB), juga mengurangi kemiskinan dan mengangkat petani ke masyarakat kelas menengah secara ekonomi (PASPI, 2017). Hasil penelitian di Jambi oleh Mara dan Fitri (2013) menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat telah mampu meningkatkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) desa sebesar 1,4 kali dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sampai 11%. Perkebunan kelapa sawit rakyat juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah tertentu dan mengurangi jumlah tanah-tanah yang sebelumnya tidak terkelola dengan baik (Jelsma *et al.*, 2017).

Perkebunan kelapa sawit swadaya adalah kebun kelapa sawit rakyat yang tidak berafiliasi dengan lembaga manapun, petani menjual sendiri hasil panen mereka ke pabrik lokal, baik secara langsung atau melalui pedagang. Petani kelapa sawit swadaya dihadapkan pada berbagai permasalahan, di antaranya keterbatasan akses terhadap sumber informasi teknologi, pembiayaan, pasar, dan informasi penting lainnya yang dapat

menghambat kemajuan petani kelapa sawit swadaya. Perkebunan kelapa sawit swadaya juga tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, bahkan belum terdata dengan baik di instansi pemerintah terkait. Tanpa dukungan pemerintah atau perusahaan besar, perkebunan kelapa sawit swadaya akan menghadapi permasalahan yang lebih serius seiring makin kuatnya tekanan dari pihak pembeli yang mensyaratkan banyak hal seperti standar *roundtable sustainable palm oil* (RSPO).

Perkebunan kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya menghadapi kendala yang lebih besar karena hampir sebagian besar kebun berada di lahan gambut yang umumnya mempunyai kesuburan dan daya dukung yang kurang baik bila dibandingkan dengan tanah mineral, oleh karena itu diperlukan upaya untuk membantu petani kelapa sawit swadaya dalam menghadapi permasalahan-permasalahannya. Upaya yang perlu dilakukan saat ini adalah pengadaan basis data kebun dan petani kelapa sawit swadaya yang selama ini memang belum ada. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan data awal tentang keragaan kebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka memberdayakan keberadaan kebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya, membuat kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang ditujukan untuk mengetahui keragaan kebun kelapa sawit swadaya di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Ambawang, Kecamatan Sungai Raya, dan Kecamatan Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan kuesioner. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.

Data primer mencakup keragaan kebun kelapa sawit swadaya, dan karakteristik petaninya. Informasi untuk keragaan kebun terdiri dari jumlah dan luas kebun, umur kebun, produksi, penggunaan sarana produksi (benih/bibit, pupuk dan pestisida), teknis budidaya, dan pemasaran, sedangkan informasi mengenai karakteristik petani terdiri dari umur, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota keluarga. Data sekunder yang berfungsi sebagai data penunjang diperoleh dari instansi terkait dan kepustakaan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### **Karakteristik Petani**

Umur rata-rata responden adalah 48,38 tahun, dengan umur termuda 21 tahun dan umur paling tua 70 tahun. Persentase tertinggi umur petani berada pada kisaran umur 40 - 55 tahun yaitu sebesar 61,90%. Umur petani sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola dan menjalankan suatu usahatani. Menurut Soekartawi (2002), umur produktif berada di antara umur 17 - 55 tahun, pada umur tersebut kemampuan fisik dan pikiran seseorang masih optimal sehingga petani dapat menjalankan usahatani dengan maksimal. Umur petani responden sebagian besar tergolong usia produktif, yaitu berada di antara umur 21 - 55 tahun (80,95%), hal ini menunjukkan bahwa petani responden cukup

mampu untuk melaksanakan dan mengelola usahatannya dengan baik. Kondisi fisik seseorang yang berada pada usia produktif umumnya mampu untuk melakukan pekerjaan pekerjaan yang erat kaitannya dengan kekuatan fisik, sehingga diharapkan produksi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi.

Tingkat pendidikan petani responden cukup bervariasi, persentase terbanyak adalah petani yang berpendidikan SMP sebanyak 33,33%, diikuti petani yang berpendidikan SD (28,57%) dan SMA (28,57%), bahkan ada yang lulusan dari PT sebesar 9,53%. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi kemampuan petani dalam menyerap informasi dan teknologi, baik melalui koran, buku, penyuluh dan media informasi lainnya. Petani dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan lebih mudah memahami apa saja yang harus dilakukan agar hasil usahatannya meningkat. Mereka akan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Rata-rata jumlah tanggungan petani responden adalah 3,67 orang, dengan jumlah tanggungan petani tertinggi berada pada kisaran 3 - 5 orang yaitu sebesar 61,90%. Jumlah tanggungan keluarga menjadi motivasi bagi petani dalam menjalankan usahatannya. Semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga maka akan semakin giat petani mengelola usahatannya dengan tujuan untuk meningkatkan hasil, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan petani. Banyaknya jumlah tanggungan, terutama tanggungan usia produktif, juga dapat menghemat biaya tenaga kerja karena tenaga kerja dalam keluarga tidak memerlukan upah.

### ***Keragaan Kebun Kelapa Sawit Swadaya***

Berdasarkan luas lahan yang diusahakan, persentase petani responden dengan luas lahan sebesar < 2 ha (sempit) sebanyak 47,62%, 2 – 10 ha (sedang) sebanyak 47,62%, dan >10 ha (luas) sebanyak 4,76%. Luas lahan akan mempengaruhi pendapatan petani, semakin luas lahan usahatani bila dikelola dengan baik maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh.

Proses pembukaan lahan pada kebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya sebagian besar (66,67%) dilakukan dengan cara bakar, 14,28% dengan cara tebang, imas, semprot, dan 19,05% dengan cara tebas dan semprot. Cara pembukaan lahan tersebut dilakukan berdasarkan kondisi lahan, untuk lahan yang vegetasi awalnya hutan dan semak belukar dibuka dengan cara bakar karena dianggap lebih mudah dan lebih ekonomis. Lahan yang kondisi awalnya kebun karet juga dibuka dengan cara bakar, sedangkan yang berasal dari ladang dilakukan tanpa bakar. Proses pembukaan lahan untuk usahatani dengan cara bakar tidak boleh dilakukan karena dapat merusak lahan dan lingkungan. Menurut Yulianti dan Fengky (2018), pembakaran lahan dapat menyebabkan rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di atasnya. Asap yang ditimbulkan menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan, dan mengganggu jarak pandang terutama untuk transportasi penerbangan. Dampak negatif ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang warga untuk melakukan pembakaran lahan, yang tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap petani responden, sebagian besar (42,86%) sudah menggunakan benih kelapa sawit bersertifikat berasal dari PPKS dan Socfindo, yaitu produsen benih kelapa sawit unggul yang berstandar internasional sesuai dengan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) sehingga terjamin mutunya. Penggunaan benih unggul akan menghasilkan tandan buah segar (TBS) dan minyak mentah/*crude palm oil* (CPO) yang dijamin jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan bibit dari benih asalan/tunas (Perdamean, 2017). Sebagian lainnya (33,3%) masih menggunakan benih yang tidak jelas asal usulnya, diperoleh dengan cara membeli di lokasi persemaian milik masyarakat. Sebagian lagi (23,81%) menanam bibit yang berasal dari brondolan yang jatuh dan tumbuh menjadi bibit tunasan yang tentu saja tidak dianjurkan untuk ditanam karena diragukan keunggulannya. Penggunaan benih yang tidak jelas ini tentu akan berdampak pada produktivitas kelapa sawit yang baru akan terlihat saat tanaman memasuki fase TM. Hal ini tentu saja akan merugikan petani karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidak-tahuan petani menjadi penyebab mengapa hal ini terjadi, untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam mensosialisasikan bagaimana cara menanam kelapa sawit yang baik dan benar.

Tenaga kerja yang digunakan pada perkebunan kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya dikelompokkan menjadi dua yaitu dikerjakan sendiri bersama keluarga sebanyak 52,38%, dan dikerjakan oleh orang lain dengan sistem upah sebanyak 47,62%. Penggunaan tenaga kerja keluarga dilakukan oleh petani karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk upah. Pekerjaan yang dianggap ringan seperti membersihkan piringan, memupuk, dan memungut brondolan dilakukan oleh istri dan anak, sedangkan pekerjaan yang berat seperti membersihkan lahan, menanam, dan panen dilakukan oleh suami dan anak laki-laki dewasa. Cara ini dianggap paling praktis, mudah, dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Petani responden yang menggunakan tenaga kerja orang lain umumnya memiliki luas lahan yang cukup besar sehingga tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Sistem pengupahan ada yang dikerjakan dengan sistem borong dan upah harian. Pekerjaan pembukaan dan pengolahan lahan, pembersihan lahan, dan panen biasanya dilakukan dengan sistem borong, sedangkan pekerjaan lainnya seperti memupuk, menyemprot, dan membersihkan piringan dilakukan dengan sistem upah harian.

Pemupukan kelapa sawit merupakan kegiatan pemeliharaan tanaman yang bertujuan untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman. Kegiatan ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar agar pertumbuhan dan hasil kelapa sawit optimal (Pahan, 2015). Penggunaan pupuk di kebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya belum dilaksanakan dengan baik, tidak semua petani responden menggunakan pupuk dalam menjalankan usahatani. Hasil wawancara menyatakan bahwa semua petani responden yang tanamannya berada pada fase TBM (33,33%) tidak menggunakan pupuk dengan alasan yaitu tidak ada biaya untuk membeli pupuk, tidak mau mengeluarkan biaya karena tanamannya belum menghasilkan, dan ada hal lain yang lebih penting untuk dibiayai. Kesadaran dan pengetahuan petani responden tentang pemupukan dan pengaruhnya

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman belum dimiliki sehingga pemeliharaan tanaman belum dilakukan secara maksimal. Sebaliknya, penggunaan pupuk sudah dilakukan oleh semua petani responden yang tanamannya berada pada fase TM (66,67%). Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk NPK, akan tetapi dosis dan waktu pemberiannya belum teratur, hanya 1 orang petani responden yang memupuk tanamannya dengan teratur setahun dua kali, yaitu petani yang memiliki luas lahan 20 ha. Kendala yang dihadapi oleh petani dalam proses pemupukan, selain kurangnya modal juga karena tidak tahu berapa dosis pupuk yang harus diberikan. Peran pemerintah dalam memberikan informasi, bimbingan dan pendampingan pada petani sangat diperlukan agar produktivitas usahatani meningkat, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya.

Keberhasilan pengendalian gulma, hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tingkat hasil yang tinggi. Penggunaan pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu pada kebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan oleh sebagian petani responden. Pengendalian gulma, selain dilakukan dengan cara manual juga menggunakan herbisida dengan alasan lebih cepat pelaksanaannya dan lebih kelihatan hasilnya. Kendala yang dihadapi adalah harga herbisida yang mahal sehingga pengendalian gulma tidak dilakukan secara periodik. Petani responden yang tidak menggunakan herbisida melakukan pengendalian gulma dengan cara tebas, ini juga tidak dilakukan secara periodik sehingga kebun terlihat tidak terawat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hampir semua kebun yang berada pada fase TBM tidak terawat dengan baik, dan dari hasil wawancara ternyata memang tidak ada kegiatan pemeliharaan tanaman pada kebunnya dengan alasan tidak ada biaya untuk melakukannya.

Pengendalian hama pada kebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan oleh sebagian petani responden yang kebunnya berada pada fase TM. Penggunaan insektisida dilakukan ketika terlihat gejala serangan rayap, itupun tidak dilakukan dengan maksimal dengan alasan harga insektisida yang cukup mahal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terlihat adanya serangan rayap pada pohon-pohon tertentu, bahkan ada pohon yang mati karena rayap. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan petani tentang keberadaan dan serangan hama menyebabkan tidak maksimalnya proses pengendalian hama tersebut.

Sebagian petani responden di Kabupaten Kubu Raya yang kebunnya berada pada fase TM (61,90%) sudah melakukan kegiatan pemangkasan walaupun tidak dilakukan secara periodik. Pemangkasan hanya dilakukan pada pohon-pohon yang berada pada lokasi yang mudah dilalui, dan biasanya pemangkasan dilakukan bersamaan dengan waktu panen. Kurangnya pengawasan pada pekerja menyebabkan kegiatan pemangkasan ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Petani responden yang kebunnya berada pada fase TM sebanyak 83,73%, dan mereka melaksanakan panen dengan rotasi panen yang berbeda-beda, sebanyak 7,14% panen dengan rotasi 10 hari sekali, 64,29% panen dengan rotasi setiap 15 hari sekali, dan 28,57% panen dengan rotasi 30 hari sekali. Rotasi panen 10 hari sekali masih dianggap

normal dan masih menghasilkan TBS yang sesuai dengan kriteria panen, sedangkan rotasi 15 hari sekali, apalagi 30 hari sekali, merupakan rotasi yang terlalu lama sehingga TBS yang dihasilkan akan berada dalam kondisi lewat matang panen. Hal ini tentu saja akan menurunkan kualitas buah, ditambah dengan pemungutan brondolan yang tidak maksimal maka akan menurunkan hasil. Pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana cara panen yang baik dan benar belum dimiliki oleh petani responden, sehingga mereka panen dengan rotasi panen yang terlalu lama.

Petani responden dengan hasil TBS kurang dari 800 kg/ha/panen (kurang dari 19,2 ton/ha/tahun) sebanyak 57,14%, dan hasil TBS di atas 800 kg/ha/panen (di atas dari 19,2 ton/ha/tahun) sebanyak 42,86%. Berdasarkan data tersebut, jika dibandingkan dengan produktivitas kelapa sawit di tingkat nasional pada tahun 2017 sebesar 19,07 ton/ha/tahun, ternyata lebih dari 50% petani responden yang produktivitas kelapa sawitnya masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produktivitas kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut mudah dipahami mengingat sebagian besar petani belum menerapkan praktik budidaya secara baik, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan tanaman. Perbaikan aspek ini tentu saja akan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan produktivitas.

Sistem tataniaga TBS kelapa sawit di Indonesia bervariasi, masing-masing rantai tata niaga akan mempengaruhi harga jual yang diterima oleh petani. Semakin panjang rantai tataniaga, akan semakin kecil penerimaan yang diterima oleh petani (Harahap *et al.*, 2017). Hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya 28,57% petani responden yang menjual hasilnya langsung ke PKS, sedangkan 71,43% lainnya menjual TBS melalui tengkulak. Penjualan TBS melalui tengkulak tentu saja akan mengurangi pendapatan petani, hal ini terjadi karena petani mengalami kesulitan dalam mengakses pasar. Kendala lain yang dialami oleh petani dalam pemasaran TBS adalah masalah transportasi TBS dari lahan ke pabrik. Kebanyakan petani mengeluhkan kondisi jalan ke pabrik yang rusak, belum adanya akses jalan yang memadai ke lahannya yang jauh, kurangnya ketersediaan angkutan TBS pada saat dibutuhkan, dan masalah-masalah transportasi lain yang sifatnya lebih individual dan kasuistik. Akibat kendala tersebut, pengangkutan TBS rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 24 jam untuk sampai ke pabrik sehingga akan menurunkan kualitas TBS. Beberapa petani bahkan ada yang membutuhkan waktu lebih dari 5 x 24 jam untuk sampai ke pabrik, sehingga kondisi ini benar-benar merugikan petani. Kondisi ini juga yang menjadi dasar pertimbangan para tengkulak menentukan harga pembelian TBS ke petani.

#### 4. Simpulan

1. Sebagian besar petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya menjalankan usahataniannya hanya sebagai pekerjaan sampingan sehingga pengelolaan yang dilakukan tidak maksimal.
2. Penerapan teknik budidaya yang dilakukan oleh petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya belum sesuai dengan “*good agricultural practice*” sehingga belum bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang diusahakan.

3. Petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya masih kesulitan dalam mengakses pasar, masalah transportasi menjadi salah satu penyebab sulitnya memasarkan hasil.

## 5. Daftar Pustaka

- Harahap, G., E.S. Simanullang, M. Romadon, 2017. Analisis Efisiensi Tataniaga Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit(Study Kasus : Petani Perkebunan Inti Rakyat Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu). *WAHANA INOVASI*, 6(2): 170 - 180
- Jelsma, I., G.C. Schoneveld, A. Zoomers, & A.C.M.van Westen. 2017. Unpacking Indonesia's Independent Oil Palm Smallholders: An Actor-disaggregated Approach to Identifying Environmental and Social Performance Challenges. *Land Use Policy*, 69: 281-297.
- Mara, A & Y. Fitri, 2013. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat terhadap Pendapatan Wilayah Desa (PDRB) di Provinsi Jambi. *AGRISEP*, 13(1):101-110.
- Pahan, I. 2015. *Kelapa Sawit, Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- PASPI. 2017. Peran Strategis Perkebunan Sawit Rakyat Indonesia. *PASPI Monitor*, 3(40):961-967.
- Perdamean, M. 2017. *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Soekartawi. 2002. *Analisis Usahatani*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Yulianti, N dan F. F. Adji. 2018. *Mari Belajar tentang Pengelolaan Lahan tanpa Bakar (PLTB)*. IPB Press. Bogor.